



Untuk dapat meningkatkan kontribusi ITB kepada masyarakat kita masih perlu mengembangkan kapasitas institusi, terutama manajemen internal pengelolaan sumber daya (akademik, keuangan, sumber daya insani termasuk mahasiswa, aset dan fasilitas, informasi, jaringan kerjasama, dll.) dalam suatu sistem yang sepenuhnya terkendali, termasuk mengembangkan sistem penjaminan mutu akademik. Hanya melalui cara itu kita dapat meningkatkan mutu akademik dan efisiensi pengelolaan ITB. Saya sangat bergembira bahwa Sdr. Rektor telah mempersiapkan program untuk mewujudkan ITB sepenuhnya auditable pada tahun 2008, suatu milestone yang menjamin akuntabilitas pemanfaatan aset serta dana pemerintah dan masyarakat yang dipercayakan kepada kita.

Anggaran ± Rp. 500 M/tahun sangat terbatas untuk dapat memfungsikan dengan baik potensi besar yang dimiliki ITB. Namun, kita perlu menyadari situasi nasional dan kemampuan pengelolaan keuangan negara belum memungkinkan pemerintah untuk meningkatkan kontribusi pendanaannya kepada pendidikan tinggi. Dengan nilai-nilai moral dan intelektual yang dimiliki perguruan tinggi, status otonomi yang diberikan tidak memungkinkan kita berdiam diri, menunggu, atau menyalahkan pihak lain untuk menyelesaikan masalah yang kita atau bangsa ini hadapi. Berbagai upaya untuk meningkatkan pendanaan ITB yang telah dimulai, akan kita lanjutkan dan tingkatkan. Antara lain yang sedang diusahakan adalah optimasi pendanaan pendidikan oleh orang tua mampu tanpa mengabaikan prinsip-prinsip akademik, keadilan dan pemihakan kepada yang lemah, penggalangan dana lestari (*endowment fund*) dari masyarakat terutama alumni, kerjasama dengan industri dan jasa profesi dengan jaringan eksternal (swasta dan pemerintah daerah) dan para alumni ITB yang telah mapan dalam bisnisnya serta kerjasama penelitian dengan lembaga-lembaga pendanaan internasional. Kerjasama tersebut bukan saja untuk mendapatkan dana guna meningkatkan mutu pendidikan dan penelitian kita, tetapi juga untuk melaksanakan peran dan amanah menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

Seperti telah disampaikan, peningkatan kemampuan pendanaan telah meningkatkan kesejahteraan dan memperbaiki kinerja pelaksanaan misi ITB. Namun, di sisi lain kita perlu menyadari bahwa harapan tingkat kesejahteraan tersebut dapat tanpa batas, kalau kita tidak mampu mengendalikan diri. Perkenankan saya pada kesempatan ini menyampaikan bahwa sekarang adalah saat yang tepat bagi kita semua untuk merenungkan kembali kehormatan yang kita miliki atas pilihan berada dalam institusi terkemuka di negara ini, tempat masyarakat menggantungkan sebagian dari harapannya. Saatnya kita bersama menunjukkan bahwa kita mampu mengembalikan idealisme dan nasionalisme, menomor-duakan kepentingan pribadi seperti ditunjukkan oleh pahlawan bangsa yang bukan saja mewakafkan harta tetapi juga menyabung nyawa, mengenyampingkan keinginan untuk hidup berlebihan, melaksanakan fungsi dan tugas kita dengan baik untuk dapat melakukan pencerahan dan memimpin perubahan di masyarakat.

Sekian sambutan yang dapat saya sampaikan dan marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur serta memohon kepada Allah SWT agar kita semua mendapatkan petunjukNya untuk dapat mengelola ITB BHMN menjadi institusi yang terkemuka di Indonesia dan terpadang di ASEAN serta di berbagai kalangan pada tingkat dunia.

Bandung, 2 Maret 2007
Majelis Wali Amanah,
Ketua,
Haryanto Dhanutirto

KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Nomor : 005/SK/K01-MWA/2007

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM PENGEMBANGAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG 2007-2011

PERTAMA :

Kebijakan Umum Pengembangan Institut Teknologi Bandung 2007-2011 sebagai berikut :

- a. Institut Teknologi Bandung melaksanakan pendidikan dan mengembangkan inovasi dalam pendidikan terutama dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi. Pendidikan berbasis akademik semata perlu dilengkapi dan dikembangkan bersama dengan ilmu-ilmu korporasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dari waktu ke waktu, sehingga para sivitas akademika menjadi terpercaya, memiliki kemampuan berusaha, berkomunikasi dan bekerjasama, serta berkompetisi dengan baik. Para lulusan diharapkan bukan saja dapat menjadi profesional yang handal dan dipercaya, tetapi juga menjadi pemimpin yang adil, pengusaha yang jujur dan bermartabat, serta pendidik yang cendikia dan mumpuni dalam ilmunya;
- b. Institut Teknologi Bandung melaksanakan penelitian untuk mengembangkan teknologi yang dapat diaplikasikan guna membangun kekuatan perekonomian nasional, dan diharapkan menghasilkan teknopreneur yang mampu mengembangkan industri dalam negeri yang kompetitif dalam era globalisasi, serta melaksanakan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang-bidang yang prospektif dan bersifat universal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat manusia;
- c. Institut Teknologi Bandung melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, membangun kekuatan moral, guna ikut berperan dalam menata kehidupan baru bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menuju masyarakat dunia yang setara, adil dan sejahtera, yang memungkinkan pemberdayaan semua budi daya bangsa, demi mengurangi jurang kaya-miskin antar manusia dan antar negara di seluruh dunia.

KEDUA :

Keputusan ini menjadi rujukan bagi penetapan kebijakan operasional, perencanaan program dan kegiatan, dan pengambilan keputusan semua unsur ITB dalam melaksanakan misi dan mewujudkan visi ITB.

KETIGA :

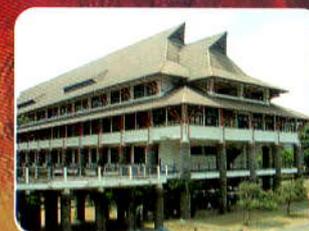
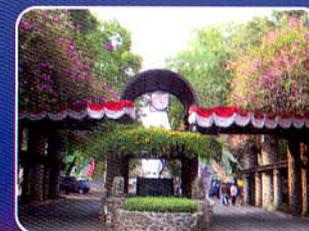
Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEBIJAKAN UMUM PENGEMBANGAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

2007-2011



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG





MEMBANGUN KAPASITAS INSTITUSI :

- **MENINGKATKAN KEPERCAYAAN DIRI**
- **MEMBERDAYAKAN ITB**
- **MEMBANGKITKAN HARAPAN BANGSA**

Prof. Dr. Haryanto Dhanutirto

Ketua Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung
Periode September 2006 - Maret 2009

Telah lama kita ketahui bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan motor perkembangan peradaban dan budaya bagi suatu bangsa. Dalam hubungan ini, semua bangsa yang unggul selalu mengusahakan agar perguruan tingginya mampu berperan sebagai pusat kemajuan dan pengembangan budaya. Hal ini dimungkinkan karena perguruan tinggi selain memiliki kemampuan ilmu pengetahuan, pengembangan teknologi dan seni, juga mempunyai kekuatan moral yang bersumber dari sistem nilai dan kebebasan akademik yang bertanggung-jawab yang diterapkannya.

Sistem nilai dan kebebasan akademik mengandung makna mencari, menggali dan menemukan kebenaran tanpa henti dengan berlandaskan kepada kaidah dan metode ilmiah, disertai kebebasan untuk mengembangkan dan mengkomunikasikannya. Bagaimana-pun kendala pengelolaan yang dihadapi, serta konsepsi ekonomi, manajemen, sosial dan kemanusiaan berkembang, nilai dan prinsip dasar tersebut perlu diperhatikan oleh setiap perguruan tinggi.

Bagi negara berkembang seperti Indonesia, perguruan tinggi mempunyai peran yang penting dalam mendorong proses demokratisasi untuk membangun masyarakat sipil yang berdaya, serta untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam interaksinya dengan dunia luas. Tanpa sumber daya yang bermutu dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kuat, mustahil produktivitas nasional kita akan menjadi bagian yang signifikan dari porsi perekonomian dunia.

Walaupun telah sembilan tahun berlalu semenjak munculnya krisis multi dimensional, pada saat ini, bangsa Indonesia masih menghadapi permasalahan yang kompleks. Pilihan untuk menjadi bangsa dengan penerapan demokrasi yang luas, ternyata berjalan lambat dan dilematis, banyak hambatan dan sering 'kebablasan'. Hal ini terutama diakibatkan oleh transisi struktur politik dan proses demokratisasi yang baru berkembang. Rendahnya integritas (lain kata dengan perbuatan), politik uang, mengutamakan kepentingan kelompok, keberadaan kelembagaan dan aktor politik instan, tarik menarik peran pusat dan daerah, adalah contoh-contoh yang telah mewarnai perkembangan politik nasional.

Selain dana yang terbatas, karena dipakai untuk membayar utang bangsa yang cukup tinggi, kondisi politik tersebut menjadi hambatan besar bagi pemerintah untuk melaksanakan reformasi birokrasi yang pada saat ini masih kental diwarnai oleh kondisi KKN. Dengan kampanye anti KKN yang kurang konstruktif dan edukatif, serta kualitas pelayanan yang rendah, perwujudan *good governance* di negara kita agak terhambat. Sebagai akibatnya restrukturisasi ekonomi berjalan lambat. Hal ini ditandai oleh adanya praktek ekonomi biaya tinggi, belum optimalnya peran perbankan dan pergeseran struktur ekonomi yang memerlukan biaya penyesuaian tinggi dengan akibat pertumbuhan yang tidak mencukupi untuk mengurangi pengangguran. Keadaan di atas tidak dapat memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kita mencatat disparitas atas bawah dan geografis makin melebar, kemampuan daya beli rakyat makin rendah, dan kemiskinan makin tinggi.

Keadaan keadaan tersebut di atas yang disertai rendahnya kondisi keamanan dan ketahanan nasional (konflik politik, ancaman berbagai virus, bencana alam yang tiada hentinya, bencana teknologi, dll.) yang masih membutuhkan perhatian yang tinggi, jelas menunjukkan bahwa bangsa kita saat ini kurang sehat, lemah dalam kemampuan dan daya tahan untuk menjawab tantangan yang dihadapi oleh bangsa kita di masa depan.

Menghadapi situasi bangsa yang rumit, sesuai dengan misi yang dicanangkan, ITB harus dapat memberdayakan diri, turut memecahkan permasalahan dan mampu untuk memimpin perubahan agar bangsa Indonesia dapat secara bertahap keluar dari krisis multi dimensi yang dihadapinya. ITB harus mempunyai kemampuan secara terus menerus membangun mutu SDM nasional yang kompetitif, mempersiapkan calon-calon pemimpin bangsa dan *captains of industries*. Ikut mendorong transformasi politik, mempercepat proses demokratisasi melalui kearifan pandangan dan upaya pembentukan kelas menengah yang aspiratif-obyektif serta kelembagaan politik yang dewasa dan berwawasan kebangsaan. ITB harus dapat membantu pemerintah dalam melaksanakan transformasi birokrasi dari yang semula berbasis konvensional menjadi sistem meritokrasi berdasarkan prinsip-prinsip *good corporate governance* sehingga efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan pada masyarakat.

ITB juga harus dapat berperan dalam proses transformasi struktur ekonomi Indonesia agar lebih kompetitif, beragam, dan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mempunyai kekuatan dan daya saing yang tinggi, serta ikut pula memotori transformasi sosial, agar dapat mengangkat tingkat kehidupan kelompok kurang mampu untuk mengurangi dan mempersempit kesenjangan.

Otonomi yang diberikan pemerintah pada tahun 2000 kepada ITB BHMN, merupakan kesempatan emas bagi ITB untuk memberdayakan dirinya. Lima tahun masa transisi telah berakhir pada tahun 2005. Selama 5 tahun tersebut, telah banyak kemajuan yang diperoleh terutama dalam hal pengelolaan manajemen internal maupun berbagai urusan eksternal.

Majelis Wali Amanat selaku organ tertinggi ITB yang mewakili kepentingan semua *stakeholders*, termasuk pemerintah, telah melakukan upaya maksimal untuk memberdayakan ITB dalam melaksanakan misi dan mewujudkan fungsinya. Dalam lima tahun pertama, MWA telah merumuskan dan menetapkan Kebijakan Umum Pengembangan ITB 2001-2006, baik dasar-dasar filosofi, akademik maupun manajemen ITB. Untuk selanjutnya MWA dengan saran-saran dari tiga pilar ITB lainnya telah menggariskan Kebijakan Umum Pengembangan ITB 2007-2011 yang pada dasarnya berisi implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk menuju kepada ITB BHMN sebagai Perguruan Tinggi berbasis Riset (*Research-based University*). Kebijakan Umum tersebut berisi pengembangan kebijakan akademik, penentuan arah penelitian dan arah pengabdian masyarakat yang harus kita semua laksanakan.

Pengembangan akademik diarahkan untuk melaksanakan pendidikan dan pengembangan inovasi dalam pendidikan terutama dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi. Pendidikan *academic sciences* perlu dilengkapi dan dikembangkan bersama dengan *corporate sciences* yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dari waktu ke waktu, sehingga para *civitas academica* menjadi terpercaya, memiliki kemampuan berusaha, berkomunikasi dengan bekerjasama, serta berkompetisi dengan baik. Para lulusan diharapkan bukan saja menjadi profesional yang handal dan dipercaya, tetapi juga menjadi pemimpin yang adil, pengusaha yang jujur dan bermartabat, serta pendidik yang cendikia dan mumpuni dalam ilmunya. Diharapkan pula bahwa lulusan ITB selain memiliki *entrepreneurship* yang tinggi juga mempunyai rasa kebersamaan dengan masyarakat sehingga mampu menjadi pemimpin masyarakat bahkan menjadi pemimpin pada tingkat nasional.

ITB sebagai perguruan tinggi yang sudah mempunyai kemampuan riset yang tinggi harus mempunyai penelitian-penelitian yang diarahkan untuk mengembangkan teknologi yang dapat diaplikasikan guna membangun kekuatan perekonomian nasional, dan diharapkan menghasilkan *technopreneurs* yang mampu mengembangkan industri dalam negeri yang kompetitif dalam era globalisasi, serta melaksanakan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang-bidang yang prospektif dan bersifat universal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Tidak dapat pula kita lupakan bahwa kita hidup diantara rakyat Jawa Barat sehingga kita harus pula ikut menyelesaikan persoalan masyarakat Jawa Barat dengan kemampuan penelitian yang ITB miliki.

Pengabdian kepada masyarakat sebagai dharma ketiga diarahkan untuk dapat menyelesaikan permasalahan bangsa, baik regional maupun nasional, dan bila perlu secara internasional; membangun kekuatan moral guna ikut berperan dalam menata kehidupan baru bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menuju masyarakat dunia yang setara, adil dan sejahtera, yang memungkinkan pemberdayaan semua budi daya bangsa, demi mengurangi jurang kaya miskin antar manusia dan antar negara di seluruh dunia.

Dengan adanya Kebijakan Umum Pengembangan ITB 2007-2011 ini diharapkan agar segenap jajaran ITB dapat mendukung serta membantu dalam implementasinya dengan sepenuh hati, sehingga ITB secara bertahap dapat memperkuat jati dirinya, serta menjadi kebanggaan dan tumpuan harapan bagi bangsa dan negara Indonesia.

Otonomi manajemen yang diperoleh memungkinkan ITB menata kembali proses, fungsi, dan struktur organisasi dalam melaksanakan misi untuk mewujudkan visi menjadi suatu perguruan tinggi berbasis riset. Perubahan mendasar yang dilakukan adalah mengubah konsentrasi pengelolaan dari pengelolaan pendidikan (Program Studi) menjadi pengelolaan keilmuan (Kelompok Keilmuan). Dalam hubungan itu, telah dilakukan restrukturisasi Fakultas/Sekolah berdasarkan keserumpunan ilmu pengetahuan dan sinergi penetrasi pada penyelesaian permasalahan dalam masyarakat.

Tanpa mengorbankan prinsip akademik, keadilan, dan pemihakan kepada yang lemah, dalam 5 tahun terakhir ITB telah meningkatkan anggarannya dari + Rp. 250 M/tahun menjadi + Rp. 500 M/tahun, suatu peningkatan yang cukup signifikan untuk mulai mendorong proses transformasi organisasi. Tambahan dana tersebut, disertai dengan upaya efisiensi dan transparansi pengelolaan, telah memungkinkan ITB dengan berbasiskan sistem merit meningkatkan kesejahteraan dosen dan pegawai non akademik.

Dalam bidang manajemen, MWA bersama dengan Dewan Audit telah merumuskan kebijakan untuk mewujudkan kondisi ITB yang sepenuhnya *auditable* dan kemudian mewujudkan, suatu kondisi yang strategis mempengaruhi kepercayaan masyarakat dalam melakukan kerjasama dan memberikan kontribusinya kepada ITB.

Hasil yang kita capai selama ini perlu kita lanjutkan. Untuk terus memaksimalkan kontribusi dari seluruh komunitas akademik dalam suasana terbuka dan semangat kebersamaan, kita perlu membangun pengelolaan yang baik (*good corporate governance*). Dalam hubungan itu, kita masih harus melengkapi banyak kebijakan dan peraturan pelaksanaan manajemen akademik dan sumber daya. Hal ini juga bermanfaat untuk meningkatkan kualitas interaksi dan koordinasi di antara unsur-unsur organisasi dan individu ITB. Kita perlu menyadari bahwa reformasi *governance*, manajemen, dan akademik yang sedang kita lakukan tidaklah sederhana, karena menghadapi banyak kendala. Terbatasnya sumber daya, kurangnya disiplin dan budaya kerja keras merupakan sebagian diantaranya, yang perlu kita atasi dengan menggalang persatuan dan meningkatkan kepercayaan di antara kita.